

Ali Usman, Ketua PATAKA

Strategi dan Implementasi Kebijakan: Menjaga Ketahanan Pangan (Beras) di Tengah Ancaman Krisis Pangan

DASAR PEMIKIRAN

Pandemi Covid-19 merongrong aktivitas kehidupan manusia yang tidak seperti sedia kala seperti aktivitas memproduksi pangan, pun dengan kebutuhan pangannya. Dalam rilisnya, FAO tidak menyebutkan Indonesia sebagai negara yang rentan krisis, tetapi sebagai status negara berkembang harus mengantisipasi menjaga ketahanan pangan nasionalnya. Situasi pandemi tidak ada yang tahu sampai kapan berakhir. Menjaga ketahanan pangan harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, karena bersinggungan dengan *supply-demand*, iklim dan cuaca alam, serta gangguan hama pada lahan pertanian yang berdampak pada gagal panen.

KAJIAN EMPIRIS

Tahun 2020 BPS merilis angka konsumsi beras berkisar 111,58 kg/kapita/tahun dari total penduduk 270 juta jiwa. Dalam menjaga ketahanan pangan, Perum Bulog menjadi lembaga vital untuk menyerap gabah milik petani untuk dijadikan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disimpan dalam gudang. Stok beras Bulog per (14 Maret 2021) hanya 883.585 ton dengan rincian sebanyak 859.877 ton (CBP) dan 23.708 ton (komersil). Sedangkan cadangan beras di masyarakat menurut Kemendag per (Februari 2021), stok beras di penggilingan padi 1 juta ton. Stok beras LPM (6,3 ribu ton), PIBC (30,6 ribu ton), Horeka (260,2 ribu ton), dan rumah tangga (3,2 juta ton).

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Jika melihat data sebaran daerah lain pada 2020, karena ada beberapa daerah yang masih defisit akibat siklus panen yang kurang optimal. Sebagai bahan evaluasi, perlu diperhatikan kinerja produksi sepanjang

2020, terutama melihat kondisi *real* pada bulan Maret tahun lalu.

2. Pemerintah perlu melakukan revitalisasi 94% Penggilingan Padi Kecil (PPK) yang ada karena kapasitas mesin pengering (*dryer*) sangat terbatas. Dibanding Penggilingan Padi Besar (PPB) dan Penggilingan Padi Menengah (PPM). Sedangkan PPK umumnya memanfaatkan lantai jemur, sementara itu pemanfaatan lantai jemur pada musim hujan tidak berfungsi optimal.
3. Perlu revitalisasi mesin pengering melalui penggantian dan penambahan peralatan yang modern untuk PPK. Dengan kredit yang mudah dan murah. Bila perlu disubsidi oleh pemerintah dengan platform modal sebesar Rp 2,5 milyar per orang. Hal ini mampu memperbaiki *performance* PPK yang berdampak memperbaiki kualitas CBP yang memadai.
4. Tugas Bulog semestinya bukan hanya pengadaan, tapi juga diberikan penyaluran beras yang pasti. Banyak beras Bulog mengalami turun mutu dan kadaluarsa sebab kehilangan momentum yakni disaat harusnya keluar gudang namun tidak keluar.
5. Jika pemerintah mau mengoreksi kebijakan yang ada maka koreksi kebijakan yaitu kebijakan HET, satgas pangan, KPSH, penyaluran beras bulog. Semua itu harus ditata ulang.
6. Kedepan beras harus menggunakan merk (*branded*). Jika sudah menggunakan merk maka sudah tidak dibutuhkan lagi Harga Eceran Tertinggi (HET), karena HET hanya untuk komoditi bukan barang merk. Sedangkan BPS mencatat bahwa banyak harga beras yang berada di atas HET, apakah yang dicatat dari pasar gelap. Karena itu, Pemerintah harus meninjau atau evaluasi kembali HET yang sudah 4 tahun berjalan.
7. Harus ada suatu badan atau organisasi yang ditugaskan untuk memantau secara Khusus terkait komoditi beras. Terpenting yang dipantau adalah bagaimana melihat neraca beras. Secara internasional neraca beras dapat dilihat pada *International Grains Conference* (IGC) baik neraca dalam negeri maupun neraca ekspor.
8. Petani di Indonesia perlu diberikan pengetahuan melalui sosialisasi mengenai iklim pertanian agar para petani mengetahui terkait perubahan iklim seperti EL-Nino supaya tidak menerka-nerka lagi.